

Editor: Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

MELAWAN DOMINASI ELIT

**Agama, Pembangunan & Ketahanan
Masyarakat Campong di Aceh**

Penulis
Hanif Saputra
Yan Risal
Sara Yulis
Andi Aulia Arafat
Ratna Dewi
Jumayadi Putra
Satria Rizki

Program Studi
**Sosiologi
Agama**



MELAWAN DOMINASI ELIT
Agama, Pembangunan dan
Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh

Editor:

Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

Penulis

**Han if Saputra, Yan Risal, Sara Yulis, Andi Aulia Arafat,
Ratna Dewi, Jumayadi Putra, Satria Rizki**



Diterbitkan Atas Kerjasama:

Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry
Bandar Publisihing
2020

**Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan
Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh** Copyright

@penulis

ISBN: 978-623-7936-48-0

Cetakan pertama, 2020

Editor: Iping Rahmad Saputra & Arfiansyah

Layout: Arfiansyah

Penulis

Hanif Saputra

Yan Risal

Sara Yulis

Andi Aulia Arafat

Ratna Dewi

Jumayadi Putra

Satria Rizki

Penerbit dan Percetakan

Prodi Sosiologi Agama

Fakultas Ushuluddin, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prodi.sa@ar-raniry.co.id

BANDAR Publishing

Ds Lamgugop

Syiah Kuala, Banda Aceh

Email: Bandar.publishing@gmail.com

www.bandarpublishing.com

Kata Pengantar
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Peran penting perguruan tinggi di Indonesia antara lain adalah melahirkan terobosan-terobosan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry memiliki program studi yang fokus pada berapa bidang pengetahuan khususnya pengetahuan keagamaan. Program studi yang ada di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki distingsi dan fokus dalam kajian mendalam dan komprehensif serta multidisipliner dalam ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu Fakultas Ushuluddin tidak lagi hanya terbatas pada kajian normativitas agama saja namun juga beragam masalah-masalah sosial dengan pendekatan keagamaan. Salah satunya adalah Sosiologi Agama.

Program Studi Sosiologi Agama memiliki visi melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi atas masalah-masalah sosial keagamaan. Hal ini untuk melihat sebuah masalah dengan perspektif yang beragam. Bukan hanya hukum Islam namun juga perspektif sosial. Dengan demikian masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat dapat dipahami dengan lebih jelas dan komprehensif. Program Studi Sosiologi Agama sudah berdiri sejak tahun 2013 dan terus melakukan kajian-kajian terkait dengan beragam masalah sosial keagamaan yang ada di dalam masyarakat Aceh. Di masa yang akan datang kita berharap melalui kajian-kajian ini program studi Sosiologi Agama dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah terutama dalam bentuk pemikiran untuk mengambil kebijakan terkait dengan kehidupan sosial keagamaan.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil kajian serius yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sosiologi Agama di bawah bimbingan para dosen untuk menggali beragam persoalan sosial yang ada dalam masyarakat dengan kacamata sosiologi. Buku ini berawal dari kebijakan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memberikan peluang untuk melaksanakan program penulisan karya ilmiah mahasiswa atau selama ini dikenal dengan skripsi diganti dengan sebuah artikel *book chapter* yang dipublikasikan. Kebijakan ini lahir sebagai bagian dari respon terhadap pandemi covid 19 yang melanda dunia sejak tahun 2020. Oleh sebab itu buku ini selain memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan program sarjana S1 juga memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dengan penyebaran pemikiran hasil penelitian.

Atas nama Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh Saya merasa sangat bangga dengan publikasi buku ini. Saya berharap penerbitan buku ini dapat menjadi sebuah tradisi baru di Fakultas Ushuluddin di masa yang akan datang sehingga hasil penelitian mahasiswa dan dosen tidak hanya sekadar untuk menyelesaikan program Strata Satu di Universitas namun juga memberikan kontribusi pemikiran di dalam masyarakat yang lebih luas dengan menerbitkan karya ilmiah tersebut ke dalam bentuk buku atau bentuk penerbitan yang lain.

Darussalam, September 2020

Dekan,

Dr. Abd. Wahid, M.Ag

Pengantar Penerbit

Penerbit Bandar Publishing sejak berdiri pada tahun 2007 fokus pada pengembangan pengetahuan sosial keagamaan melalui penerbitan buku. Kerjasama dengan Program Studi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh merupakan usaha kami dalam menyebarkan pengetahuan khususnya hasil kajian akademisi ke ruang yang lebih luas. Selama ini banyak kajian akademisi di kampus yang terpendam dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena hanya disimpan di kantor dan atau perpustakaan. Dengan melakukan sedikit penyesuaian, karya-karya yang bagus dari dosen, mahasiswa, dan civitas akademika pada umumnya dapat dikonsumsi oleh publik.

Kami memiliki komitmen kuat untuk terus mendukung lembaga pendidikan tinggi dalam mempublikasi hasil penelitian mereka dalam bentuk buku. Posisi Bandar Publishing sebagai mitra resmi toko buku Gramedia Indonesia di Aceh memberikan peluang buku-buku karya cendekiawan di Aceh mendapatkan pasar di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu ke depan kita berharap karya-karya tersebut bukan hanya menjadi koleksi dan bacaan di kampus namun juga menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia.

Semoga penerbitan buku ini menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh Bandar Publishing bersama Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry dalam rangka mengembangkan budaya literasi bukan hanya di Aceh namun juga Indonesia pada umumnya.

Lamgugob, Oktober 2020
Direktur,
Dr. Mukhlisuddin Ilyas, M.Ed

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Pengantar Penerbit	iii
Daftar isi	vii
Kata Pengantar Editor	1
Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota Tentang Syari'at Islam di Aceh	3
<i>Hanif Saputra, Sehat Ihsan Shadiqin, Musdawati</i>	
Kearifan Lokal Sebagai Basis Ketahanan Sosial Masyarakat	31
<i>Yan Risa/, Sehat Ihsan Shadiqin, Suci Fajarni</i>	
Makam Abu Ibrahim Woyla dan Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pasi Aceh Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Ba rat	51
<i>Sara Yu'is, Abd Madjid, Taslim H.M Yasin</i>	
Melawan Dominasi Pengusaha Sawit: BUMK Maju Bersama Dan Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Masyarakat Kampung Lae Pinang, Aceh Singkil	79
<i>Andi Aulia Arafat, Bustami Abu Bakar, Nurlaila</i>	
Dana Desa dan Pengaruhnya Dalam Kegiatan Keagamaan di Aceh	107
<i>Satria Rizki, Taslim HM Yasin, Abd Madjid</i>	
Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan di Desa Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.....	133
<i>Ratna Dewi, Zuherni AB, Fatimahsyam</i>	
Dampak Pariwisata Terhadap Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	155
<i>Jumaiyadi Putra, Taslim HM Yasin, Suci Fajarni</i>	

**Game Online dan Dampaknya pada Modal Sosial
(Studi Kasus pada Remaja Gampong Lhong Cut
Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh)..... 169**
Linda Fahrni, Sehat Ihsan Shadiqin, Suci Fajarni

Biografi penulis 189



Pengantar Editor

Buku *Melawan Dominasi Elit: Agama, Pembangunan dan Ketahanan Masyarakat Gampong di Aceh* yang kini berada di tangan pembaca adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Buku ini adalah 1 dari 4 buku yang diterbitkan oleh Prodi Sosiologi Agama tahun ini. Sama seperti buku ini, tiga buku lainnya juga adalah hasil penelitian skripsi mahasiswa Prodi Sosiologi Agama.

Menyajikan hasil penelitian tugas akhir mahasiswa ke publik adalah salah satu bentuk pertanggungjawab akademik mahasiswa kepada orang tua dan masyarakat. Setelah kurang lebih 4 tahun merantau ke Banda Aceh, mereka menunjukkan bahwa mereka telah layak menyandang gelar sarjana Strata Satu. Buku ini adalah bukti kelayakan mereka.

Tentu saja banyak kekurangan pada semua bab di buku ini, seperti kedalaman analisa, tehnik penulisan dan lain sebagainya yang akan pembaca temui di setiap sudut buku ini. Kekurangan tersebut bukanlah sesuatu yang memalukan. Namun juga bagian dari pelajaran itu sendiri. Seiring perjalanan waktu, para penulis di buku ini, sama seperti lainnya yang jauh lebih senior akan menertawakan sendiri masa lalu mereka. Dengan buku ini mereka akan berkaca dan kemudian bergaya kembali. Dan dengan karya mereka di buku ini, pembaca juga akan berkaca dan kemudian juga bergaya.

Terlepas dari semua kekurangan, kehadiran buku ini patut diapresiasi karena tidak banyak mahasiswa yang bersedia mempublikasi hasil penelitian mereka ke publik karena beragam alasan seperti malu, tidak percaya diri dan takut dibully. Karenanya kita patut menghargai keberanian dan semangat mahasiswa yang berkontribusi dalam buku ini.

Buku ini juga hadir berkat dukungan dari UIN AR-Raniry di masa pandemic Covid 19. Pandemi tersebut memaksa UIN Ar-Raniry untuk mengadaptasikan program akademik yang diserang pandemi. Buku bunga rampai ini, yang UIN Ar-Raniry menyebutkan program *book chapter*, merupakan salah satu solusi agar mahasiswa yang tidak dapat melakukan penelitian lapangan dapat menyelesaikan studi mereka tepat waktu.

Prodi Sosiologi Agama mengambil kesempatan perubahan tradisi akademi untuk tugas akhir ini dengan baik. Dan tanpa disangka, melampaui harapan semula. Tradisi Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sosiologi Agama adalah penelitian lapangan. Program book chapter ini memungkinkan mahasiswa untuk melakukan penelitian literature dengan dukungan data lapangan yang porsinya jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Tentu ini sedikit mengkhawatirkan para dosen mengingat kemampuan membaca mahasiswa masih rendah daripada kemampuan menarasikan pengalaman. Tak disangka, para penulis mematahkan kekhawatiran tersebut dengan cara yang sangat elegan. Meski dilakukan dalam kurun waktu yang sangat sempit, karena program diperkenalkan 2 bulan sebelum jadwal sidang skripsi berakhir, mereka membuktikan bahwa penelitian untuk tugas akhir di Prodi Sosiologi Agama juga bisa dilakukan dengan pendekatan kepustakaan.

Ke depan, dengan waktu penelitian yang lebih panjang, buku bunga rampai yang sama tentu akan dapat menghasilkan narasi-narasi kehidupan sosial masyarakat Aceh yang lebih baik dan apik.

Banda Aceh, 8 Oktober 2020

Editor

Iping Rahmat Saputra & Arfiansyah

Melawan Dominasi Pengusaha Sawit: BUMK Maju Bersama Dan Pemenuhan Kebutuhan Pertanian Masyarakat Kampung Lae Pinang, Aceh Singkil.

Andi Aulia Arafat, Bustami Abu Bakar, Nurlaila

Pendahuluan

Partisipasi masyarakat di akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik seiring dengan meningkatnya pengembangan masyarakat dalam segala kegiatan pembangunan. Kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya aktivis-aktivis sosial yang terlibat dalam kegiatan pembangunan melalui aksi-aksi pengembangan masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat itu sendiri telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik di tingkat regional, nasional maupun global.¹

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu tujuan pemerintah yang harus dicapai yaitu meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil dan pembangunan berbasis masyarakat adalah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).²

¹ Rismawati, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perwitasari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal" (Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Walisongo, 2018), hlm.1.

² I. Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng," *Locus* 9, no. 1 (1 Februari 2018): hlm.51, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/79>.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa: Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian perekonomian di pedesaan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya diserahkan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.³

BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk penyedia pelayanan sosial dan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui barang dan jasa. Dari berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Dewi Kiro wati dan Lutfiyah Dwi S, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat Desa itu sendiri, BUMDes bergerak dalam bidang simpan pinjam sehingga mampu menciptakan usaha baru, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Desa.⁵

Yuli Widyastuti, menyebutkan bahwa berdirinya BUMDes Sejahtera sejak tahun 2013 yang bergerak dalam bidang peternakan hingga sekarang belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat serta kesejahteraan yang belum merata, hal itu terjadi

³ *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2017), hlm.2.

⁴ Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Membangun Dan Pembedayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro," *Jurnal Dialektika* 11, no. 1 (2016): hlm.87.

⁵ Dewi Kirowati dan Lutfiyah dwi Setia, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)," *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 3, no. 1 (28 Mei 2018): hlm.15, <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>.

dikarenakan kinerja pengurus BUMDes Sejahtera yang masih kurang maksimal masih dan masih banyaknya kendala lainnya.⁶

Maria Rosa Ratna sri Anggraeni hasil penelitiannya menyebutkan keberadaan BUMDes tidak dipungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. BUMDes memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan cara mengembangkan pariwisata, namun pendapatan ini tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini kemudian yang menyebabkan masyarakat berpendapat bahwa BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁷

Hasil studi dari beberapa penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah BUMK Maju Bersama dalam penelitian ini bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan pertanian kelapa sawit. BUMDes di beberapa daerah sudah mampu memberikan kontribusi dengan baik secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat Desa.

Di Aceh BUMDes disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), sedangkan di Aceh Singkil tepatnya di Kampung Lae Pinang sebutan Desa berubah menjadi kampung, maka menjadi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Pertumbuhan BUMG di Aceh begitu cepat, pembentukan BUMG dilakukan melalui musyawarah gampong, pendirian BUMG harus ditetapkan melalui Qanun gampong melalui amanah UU Desa No.6 2014.

UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan jawaban untuk mengembangkan dan mengembalikan otonomi asli Gampong. BUMG adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh besar modalnya dimiliki oleh Gampong yang berasal dari kekayaan gampong bertujuan untuk mengelola aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat gampong.

⁶ Yuli Widyastuti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm.1., <http://repository.radenintan.ac.id/1445/>.

⁷ Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta," *Modus* 28, no. 2 (2016): hlm.165.166.

Dalam pengelolaannya belum semua BUMG maksimal, ada yang sudah berhasil dan ada juga yang belum berhasil.⁸

Baihaqi dkk, pengelolaan BUMG di Aceh Timur antara pengurus dan pengawas telah memahami tugas pokok dan fungsi BUMG. Pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan BUMG, pelatihan yang dilakukan berbasis *edu technopreneurship*, sebuah terobosan baru yang dilakukan pengurus dalam mengelola BUMG untuk mengembangkan usahanya.⁹

Kheriah dkk, BUMG dalam pengelolaannya menghasilkan usaha yang produktif dan mampu meningkatkan penghasilan keluarga. Hal itu dilihat dari pembuatan sabun cuci piring yang melibatkan masyarakat setempat, dalam proses pembuatannya bahan baku yang digunakan memanfaatkan bahan organik yang ramah lingkungan. Sabun cuci piring yang telah dibuat kemudian dikemas dan ditampung oleh BUMG, BUMG berperan besar dalam pemasaran produk tersebut.¹⁰

Penelitian ini tidak mengkaji seluruh BUMDes yang ada di nasional maupun yang ada di Aceh secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BUMK Maju Bersama menjalankan perannya untuk mematahkan dominasi pengusaha sawit dalam pemenuhan kebutuhan pertanian di Kampung Lae Pinang, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran BUMK Maju Bersama memiliki peranan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan di bidang

⁸ Said Mudasir, "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm.1.2, <http://library.ar-raniry.ac.id/>.

⁹ Muhammad Baihaqi, Syardiansah Syardiansah, dan Zulkarnen Mora, "Penguatan Kapasitas BUMG Bersama Minapolitan Meuras Saban Kabupaten Aceh Timur Melalui *Edu teknopreneurship*," *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (31 Oktober 2019): hlm.92, <https://doi.org/10.31604/jpm.v2i2.85-93>.

¹⁰ Kheriah dkk., "Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair Sebagai Salah Satu Unit Usaha BUMG pada Gampong Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe," *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 3, no. 1 (2019): hlm.88.

pertanian. Sebelum terbentuknya BUMK Maju Bersama, masyarakat Kampung Lae Pinang terkendala oleh keterbatasan mendapatkan stok kebutuhan pertanian. Kendala tersebut dikarenakan oleh jarak dan infrastruktur jalan yang tidak layak sehingga sangat sulit penjual kebutuhan pertanian masuk ke Kampung Lae Pinang. Selain itu kebutuhan pertanian dipegang oleh pengusaha kelapa sawit. Banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak meratanya pembagian pupuk. Biasanya di dalam pembagian pupuk yang lebih diutamakan adalah masyarakat yang mempunyai hubungan kekerabatan atau masyarakat yang menjual hasil taninya (kelapa sawit) kepada pengusaha tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat, juga akan memberatkan masyarakat yang kurang mampu dan berpengaruh terhadap hasil panen, hasil panen ini yang kemudian akan berdampak pada pendapatan masyarakat.

Adapun fokus yang akan diteliti dalam tulisan ini meliputi pengelolaan dan program-program yang dijalankan BUMK Maju Bersama, kendala yang dihadapi BUMK Maju Bersama, serta respons masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan dan peran BUMK Maju Bersama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini di antaranya yaitu Camat Kecamatan Singkohor, Kepala Kampung Lae Pinang, pengurus BUMK Maju Bersama, dan masyarakat Kampung Lae Pinang.

Kerangka Konseptual

BUMDes adalah suatu badan usaha yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk memperkuat sektor perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes juga mempunyai peran sebagai lembaga sosial melalui sumbangsihnya untuk kepentingan dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat. selain itu BUMDes

sebagai lembaga komersial bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa melalui mencari keuntungan.¹¹

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tertuang dalam Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa di mana pengelolaan dan kepemilikan modal dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes berupa pelayanan ekonomi desa seperti, perdagangan hasil pertanian, penyaluran sembilan bahan pokok, usaha jasa, serta industri dan kerajinan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BUMDes.¹²

BUMK Maju Bersama dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai badan usaha yang didirikan oleh pemerintah Kampung Lae Pinang atas dasar inisiatif dari masyarakat yang diharapkan dapat menjadi sebuah badan usaha yang nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung Lae Pinang.

Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemberdayaan dilakukan untuk menggali potensi yang ada di desa. Potensi Kampung yang dapat dikelola oleh BUMK Maju Bersama yaitu berupa kebun kelapa sawit, pesta warga kampung, dan lahan fasilitas. Setelah potensi tersebut ditemukan kemudian dilakukan pengembangan melalui peran BUMK Maju Bersama. Program yang dijalankan BUMK Maju Bersama berdasarkan inisiatif masyarakat Kampung Lae Pinang.¹³

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) atau sekarang yang lebih dikenal dengan Kementerian Koordinator Bidang

¹¹ Ahmad Nur Ihsan dan Budi Setiyono, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (25 September 2018): hlm.1.

¹² Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (6 November 2015): hlm.360, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7n03.396>.

¹³ Binti Isnaul Haasnah, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung" (IAIN Tulungagung, 2019), hlm.80.

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI) memberikan pengertian tentang sejahtera yaitu suatu masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar yang dimaksud dapat berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, lapangan pekerjaan, pendidikan, serta kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. Juga terpenuhinya partisipasi dan hak asasi manusia serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

khususnya di Kampung Lae Pinang keberadaan pengembangan berbasis ekonomi di perkampungan selama ini dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Salah satu faktor yang mendominasi adalah para pengusaha yang tidak adil dalam pengelolaan dan pendistribusian pupuk sehingga terjadi kesenjangan di lingkungan masyarakat. Para pengusaha tersebut lebih mementingkan masyarakat yang mau bekerja sama dengan mereka dalam perdagangan kelapa sawit.

BUMK Maju Bersama harus lebih menekankan sosialisasi untuk mengajak masyarakat membeli kebutuhan pertanian yang disediakan oleh BUMK, hal ini dilakukan untuk mematahkan dominasi pengusaha sawit yang tidak adil dalam memberikan kebutuhan pertanian masyarakat. Sedangkan di dalam Islam dikenal dengan prinsip keadilan sosial. Al-Qur'an sangat menekankan urgensi keadilan sosial dalam kehidupan muslim. Dari visi umum kehadiran Islam terlihat jelas bagaimana Islam mendudukan posisinya untuk memberikan keadilan tidak hanya terbatas bagi manusia, namun juga mencakup semua ragam makhluk Tuhan di jagad raya ini.¹⁵

Keadilan sosial di Kampung Lae Pinang ditempuh melalui ide inovasi melahirkan BUMK Maju Bersama dalam bidang pemenuhan kebutuhan pertanian. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat terbantu

¹⁴ Ikhsan Maulana Malik, Dewi Rahmi, dan Ria Haryatiningsih, "Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di Kota Bandung," no. 2 (2015): hlm.3, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/2898>.

¹⁵ Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 14, no. 1 (2013): hlm.155.

dalam suplai kebutuhan pertanian, sehingga masyarakat sama rata dapat memenuhi kebutuhan pertaniannya tanpa ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan berdirinya BUMK Maju Bersama di Kampung Lae Pinang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta menumbuhkan rasa syukur, masyarakat lebih gemar bersedekah, menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid, mendorong masyarakat lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah swt.

Landasan Dasar Pembentukan BUMK Maju Bersama

Ide dan gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Maju Bersama yang mencetuskan adalah BPG (Badan Permusyawaratan Gampong) bermula dari TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang membidangi tentang PNPM dan BKPG (Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong).

BUMK Maju Bersama dasar pembentukannya ialah melalui Qanun/Peraturan Kampung/Desa pembentukan BUMK Nomor 83 Tanggal 11 Desember 2018 tentang APB-BUMK. Memiliki visi Mewujudkan desa mandiri dan menciptakan Lapangan pekerjaan, dan misi Meningkatkan pendapatan asli Desa (PADes), untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat, menggali dan memberdayakan potensi desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi Kampung yang dapat dikelola oleh BUMK Maju Bersama yaitu kebun kelapa sawit, pesta warga kampung, dan lahan fasilitas.¹⁶

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Aceh Singkil yakni tepatnya di Kecamatan Singkohor merupakan sebuah kecamatan yang memiliki 6 (Enam) Kampung/Kelurahan yang terdiri dari Kampung Lae Pinang, Kampung Lae Sipola, Kampung Mukti Harapan, Kampung Pea Jambu, Kampung Singkohor, dan Kampung Srikayu. Secara administrasi Kampung Lae

¹⁶ Kampung Lae Pinang, "Data Ril Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Maju Bersama" (Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, 2018).hlm.1.2.

Pinang berada di Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Umumnya mata pencaharian masyarakat Kampung Lae Pinang sebagian besar dibidang pertanian kelapa sawit, yang merupakan sektor unggulan dan penopang perekonomian masyarakat, oleh karena itu penduduk kampung Lae Pinang masih bergantung kepada hasil pertanian untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹⁷

Manajemen dalam BUMK Maju Bersama

Penelitian ini menggunakan teori organisasi klasik tentang manajemen administrasi. Teori organisasi klasik disebut juga teori administrasi atau teori manajemen administratif. Salah satu tokohnya yaitu Henry Fayol. Manajemen merupakan bagian dari kegiatan dalam badan usaha, untuk mempelajari tentang kinerja dalam sebuah organisasi. Kajian dari teori ini salah satu di antaranya adalah membahas mengenai bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan visi misi dari organisasi tersebut.

Terdapat 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol, di antaranya divisi kerja, otoritas dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arahan, menomor-duakan kepentingan individu, pemberian upah, sentralisasi, rantai skalar, keteraturan, keadilan, stabilitas dalam kedudukan, inisiatif, semangat tim.¹⁸

Dari 14 asas tersebut Fayol meringkasnya menjadi 5 (lima) asas, yang disebut sebagai fungsi manajemen yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Perintah atau Pengarahan, Koordinasi, Pengawasan.¹⁹

Kajian teori dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan visi misi organisasi tersebut. Jika teori ini digunakan untuk mengamati BUMK Maju Bersama khususnya, BUMK

¹⁷ Observasi Peneliti di Kampung Lae Pinang, 23 Januari 2020.

¹⁸ Yovita Sabarina Sitepu, "Paradigma Dalam Teori Organisasi Dan Implikasinya Pada Komunikasi Organisasi," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 2 (3 Oktober 2011): hlm.84.85.

¹⁹ Leonardo Budi Hasiholan, "Teori Organisasi Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah," *Dinamika Sains* 10, no. 24 (2012): hlm.7, <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/86>.

ini juga memiliki visi dan misi yang kemudian menjadi pedoman dan tujuan yang harus dicapai di masa sekarang dan masa mendatang.

Perencanaan: Perencanaan merupakan tahap paling awal dan sangat penting dalam pembentukan suatu organisasi yang nantinya akan mengetahui segala penetapan tujuan, penetapan aturan. Penyusunan perencanaan pada pengelolaan BUMK Maju Bersama sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Lae Pinang.

Pengorganisasian, di tahap ini pengorganisasian pada BUMK Maju Bersama bertujuan dalam pembagian tugas pengurus dan lain-lain, pembagian ini berdasarkan potensi pengurus yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

Pengarahan: setelah menetapkan tujuan pada tahap perencanaan, dan telah melewati tahap pengorganisasian, kemudian ke tahap pengarahan, nantinya pengarahan dilakukan untuk memberikan arahan kepada para pengurus melalui motivasi, dan bertujuan untuk menyinkronkan tujuan individu dengan tujuan organisasi yang terbentuk menjadi tujuan bersama, sehingga dalam pengelolaannya BUMK Maju Bersama dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Koordinasi: dalam pengelolaan BUMK Maju Bersama perlu adanya pengoordinasian yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, kesalahpahaman antar anggota, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan kerja sama yang terarah untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja dalam rangka mencapai tujuan BUMK Maju Bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Lae Pinang.

Pengawasan: Membahas mengenai bagaimana pimpinan melihat atau mengawasi segala pelaksanaan tugas, selain itu pada pengawasan pimpinan mengawasi bagaimana perkembangan BUMK Maju Bersama dari waktu ke waktu. Pengawasan bertujuan agar setiap pengurus BUMK Maju Bersama menjalankan perannya dengan baik.

Pengelolaan dan Program-Program BUMK Maju Bersama

Pengelolaan

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Maju Bersama dibentuk sejak Tanggal 11 Desember 2018, sejak awal mula berdirinya hingga sampai saat ini pengurus sudah berusaha melakukan yang terbaik dalam pengelolaannya maupun dalam merancang serta menjalankan program-programnya.

Sunardi selaku pengurus BUMK Maju Bersama, beliau menjelaskan bahwa perencanaan merupakan tahap paling awal dalam pembentukan kepengurusan BUMK Maju Bersama, hal ini dilakukan melalui musyawarah kampung untuk penetapan tujuan program yang akan dijalankan sesuai dengan potensi asli kampung, penetapan aturan, serta memilih orang-orang yang memiliki potensi dan kompeten dalam menjalankan setiap bidang yang ada di BUMK Maju Bersama. Di dalam musyawarah selalu melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan ada beberapa pihak lain seperti pendamping kampung, BPKam (Badan Permusyawaratan Kampung), pemerintah kampung, serta pemerintah kecamatan.

BUMK Maju Bersama membagi tugas pengurus menjadi beberapa bidang, pembagian ini berdasarkan potensi pengurus yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dalam merekrut anggota harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, diharapkan dapat memberikan pelayanan dan menunjang kinerja BUMK Maju Bersama yang lebih baik ke depannya. Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMK Maju Bersama jika dilihat dari segi usaha bukan hanya terfokus pada satu bidang saja yang dijalankan. Ada bermacam-macam bidang kepengurusan yang berjalan saat ini, yaitu:

1. Direktur/pimpinan
2. Bendahara (bagian keuangan)
3. Sekretaris (bagian administrasi)
4. Pemasaran, di dalam pemasaran terbagi menjadi tiga bagian,
 - a. Usaha Perdagangan (pupuk dan pestisida)
 - b. Usaha Penyewaan (tratak dan pakaian adat)

- c. Usaha Keuangan (BRI Link), untuk BRILink sementara ini dirangkap oleh bendahara.

Susunan Kepengurusan BUMK Maju Bersama

Keputusan Keuchik atau nama lain	Nomor :85 Tanggal :11 Desember 2018 Tentang :Pembentukan BUMK
Pelaksana Operasional	Direktur :Sunardi Sekretaris :Linda Yunanda Bendahara :Novita Sari
Kepala Unit Usaha Perdagangan	Panji Pradipta
Kepala Unit Usaha Penyewaan	Riadi Suprihatin
Kepala Unit Usaha Keuangan	Novita Sari
Pengawas	Rahmat

Struktur BUMK Maju Bersama berdiri sendiri terpisah dari Kampung dan BPKam (Badan Permusyawaratan Kampung). Pemerintahan Kampung dan BPKam menjadi komisaris BUMK. Secara laporan ada dinding pemisah antara BUMK dengan Kampung, meskipun dana yang diterima oleh BUMK berasal dari dana Kampung. BUMK mempunyai laporan tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan ke Kampung dan Inspektorat.

Ketua BUMK Maju Bersama selalu memberikan pengarahan kepada anggotanya melalui evaluasi, tujuannya untuk membenahi dan meningkatkan produktivitas pemasaran, semakin banyak pupuk yang terjual maka semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh BUMK Maju Bersama. Pendapatan ini nantinya sebagian akan digunakan untuk keperluan membayar gaji setiap pengurus, modal belanja, dan sisanya masuk ke kas kampung. Pengurus yang menjalankan bidangnya dengan baik akan mendapatkan bonus. Pendapatan berupa gaji yang didapatkan merupakan penunjang motivasi kinerja setiap pengurus.

Tenaga kerja tambahan dibutuhkan BUMK Maju Bersama sebagai penjaga gudang, tentu akan meringankan tugas pengurus agar bisa lebih fokus mengembangkan bidang usahanya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dengan sewa

teratak yang akan memakai jasa tenaga kerja Pemuda Kampung untuk membantu memasang teratak. Secara tidak langsung BUMK Maju Bersama mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di kampung Lae Pinang.

Media yang digunakan untuk sosialisasi tentang peran BUMK Maju Bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui musyawarah kampung, melalui spanduk, dan brosur-brosur yang ditempel di tempat keramaian, serta melalui tatap muka dari rumah ke rumah, juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan barang yang dijual oleh BUMK Maju Bersama.

Membeli kebutuhan pertanian di BUMK tidak ada perbedaan antar golongan masyarakat, tidak ada perbedaan harga, semua masyarakat berhak mendapatkan yang subsidi maupun non-subsidi, dengan satu ketentuan masih warga kampung Lae Pinang, semua tetap sama akan dilayani dengan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecemburuan sosial yang akan berdampak pada keharmonisan masyarakat. Untuk meningkatkan pendapatan BUMK Maju Bersama, penjualan kebutuhan pertanian dilakukan tidak hanya terfokus di Kampung Lae Pinang saja, banyak pembeli yang berdatangan dari luar Kampung, barang yang dijual ke luar Kampung merupakan barang non-subsidi, dengan ketentuan masyarakat Kampung Lae Pinang sudah terpenuhi kebutuhan pertaniannya.

Koordinasi dilakukan untuk mengatasi permasalahan di dalam kegiatan dengan cara musyawarah dalam mengambil keputusan, setiap bidang saling membantu antar bidang lainnya. Rapat internal antar pengurus dilakukan untuk membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi dan cara memecahkan masalahnya serta mencari solusi terbaik. Rapat internal juga bertujuan untuk menyampaikan keluh kesah yang dirasakan oleh pengurus, pimpinan harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggotanya, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya sistem kepemimpinan yang otoriter di dalam BUMK Maju Bersama.

Masyarakat bisa mendatangi kantor kepala kampung perihal menyampaikan kritik dan saran dalam upaya kontrol yang dilakukan terhadap kinerja kepengurusan BUMK Maju Bersama, karena wewenang

penuh dipegang oleh pemerintah kampung dan secara struktural posisi Pemerintahan Kampung di atas lembaga organisasi BUMK Maju Bersama. Pengawasan juga dapat dilakukan melalui musyawarah kampung dalam membahas laporan pertanggung jawaban, lalu diharapkan respons, masukan, dan ide dari masyarakat tentang rancangan kegiatan yang akan dijalankan. Dengan bertambahnya usaha yang dijalankan BUMK Maju Bersama maka bertambah juga PAD (Pendapatan Asli Desa/Kampung) yang semakin besar. Selama ini belum ada pengurus yang diberikan sanksi bagi yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yang tidak sanggup akan mengundurkan diri dan disampaikan langsung secara resmi kepada kepala Kampung dengan alasan yang jelas serta tidak meninggalkan masalah apa pun di BUMK Maju Bersama.

Program

Program yang dijalankan BUMK Maju Bersama yaitu untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Kegiatan yang sedang dijalankan BUMK Maju Bersama untuk saat ini berupa perdagangan pupuk dan pestisida, penyewaan teratak, dan BRI Link, dari semua unit usaha tersebut yang dihasilkan berupa keuntungan BUMK.

Anggaran tahun 2021 akan dilakukan program baru berupa pengembangan usaha dalam bidang jual beli hasil pertanian masyarakat (sawit), dengan harga yang lebih mahal dari yang lain, tujuannya untuk mengangkat perekonomian masyarakat Kampung Lae Pinang. Sesuai dengan misi BUMK yang telah disampaikan kepada masyarakat yaitu memberikan solusi tentang selisih harga dari harga pasar, hal ini sudah disetujui dan menjadi tuntutan bagi masyarakat.

Sejauh ini program yang dijalankan dalam bidang agama yaitu memberikan potongan harga untuk sewa teratak yang akan digunakan dalam kegiatan keagamaan seperti maulid nabi, acara zikir, dan apa pun itu yang menyangkut keagamaan. Diharapkan keberkahan akan membawa BUMK Maju Bersama lebih maju lagi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja pengurus dan pendapatan BUMK Maju Bersama dilakukan program studi banding ke luar daerah khususnya ke pulau Jawa, di mana di sana banyak terdapat BUMK yang sudah berhasil. Biaya yang digunakan dalam menjalankan program ini menggunakan dana Kampung. program ini bertujuan agar pengurus bisa belajar dan menyerap ilmu bagaimana cara pengelolaan BUMK yang baik, nantinya ilmu yang didapat bisa diterapkan pada BUMK Maju Bersama dan harapan ke depannya bisa lebih meningkatkan kehidupan masyarakat Kampung Lae Pinang.²⁰

Kendala yang dihadapi BUMK Maju Bersama

Sejauh ini banyak kendala yang dihadapi BUMK, pengurus sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kendala tersebut. Sebagaimana suatu lembaga organisasi atau badan usaha pasti ada jatuh bangunnya. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMK Maju Bersama di antaranya sebagai berikut: Dana anggaran BUMK untuk tahun 2020 belum dialokasikan, dikarenakan belum terjalannya komunikasi dengan baik antara kepala kampung dengan pengurus BUMK Maju Bersama, terlebih lagi Kampung Lae Pinang baru saja melakukan pemilihan kepala kampung untuk periode tahun 2019-2024, sehingga kepala kampung belum mengetahui secara detail mengenai program kerja BUMK untuk ke depannya. Dana anggaran tahun 2019 digunakan untuk pembangunan gudang BUMK, mengingat gedung awal yang digunakan adalah gedung pertemuan milik Kampung.

Kedisiplinan merupakan hal yang paling utama dalam keberhasilan sebuah usaha, akan tetapi hal itu belum sepenuhnya diterapkan. Pengurus BUMK Maju Bersama merupakan pekerja paruh waktu (sambilan) sehingga belum ada yang fokus maksimal. Hal ini dikarenakan masih sulitnya BUMK Maju Bersama memberikan gaji secara tetap, permasalahan ini didasari oleh pendapatan BUMK Maju Bersama yang belum konsisten

²⁰ Wawancara dengan Sunardi Selaku Pimpinan Pengurus BUMK Maju Bersama, di Kampung Lae Pinang, 23 Januari 2020.

Bidang pemasaran belum menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan, belum ada dana untuk menambah stok kebutuhan pertanian terutama pupuk. Kemudian masyarakat kurang aktif dalam musyawarah Kampung, pengurus sudah berusaha semaksimal mungkin mengundang semua masyarakat untuk menghadiri musyawarah tersebut, namun masih banyak masyarakat yang tidak dapat hadir dikarenakan kesibukannya.

Setiap pengurus masih butuh bimbingan dan juga masih harus banyak belajar untuk menguasai bidangnya masing-masing. Selain itu kekompakan antar pengurus merupakan kendala yang sering dihadapi. Pendapatan dari BUMK belum mampu untuk memotivasi kinerja setiap pengurus.²¹

Respons Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Peran BUMK Maju Bersama.

Respons Masyarakat

Masyarakat kampung Lae Pinang sangat mendukung terhadap ide dan gagasan pembentukan BUMK Maju Bersama, selama kegiatan itu masih positif dan tidak merugikan pihak mana pun dukungan akan selalu diberikan. Hadirnya BUMK Maju Bersama di Kampung Lae Pinang dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan pertanian dengan selisih harga yang sangat terjangkau.

Karmadi selaku warga kampung Lae Pinang menjelaskan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan perencanaan pembentukan BUMK Maju Bersama merupakan suatu bentuk dukungan, hadirnya BUMK Maju Bersama di Kampung Lae Pinang sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pertanian terutama pupuk, terkhusus bagi petani yang sawitnya masih kecil, karena membutuhkan perhatian serta perawatan yang lebih, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan pupuk, kapan pun masyarakat butuh pupuk BUMK Maju Bersama selalu menyediakan.

²¹ Wawancara dengan Sunardi Selaku Pimpinan Pengurus BUMK Maju Bersama, di Kampung Lae Pinang.

Perubahan yang terjadi di tengah Masyarakat sebelum dan sesudah adanya BUMK Maju Bersama sangat jelas dirasakan, sebelum adanya BUMK Maju Bersama masyarakat saling rebutan saling mendahului untuk mendapatkan kebutuhan pertanian, tak jarang dalam hal ini timbullah rasa iri yang mengakibatkan ketidak-harmonisan di tengah-tengah masyarakat. Namun setelah adanya BUMK Maju Bersama masyarakat tidak perlu khawatir kehabisan kebutuhan pertanian, tidak perlu saling dulu-mendahului semua pasti kebagian, Perubahan lainnya yang bisa dirasakan masyarakat meningkatnya hasil panen dan membaiknya perekonomian.²²

Sedangkan Mahbub Husaini warga kampung Lae Pinang menjelaskan bahwa ide dan gagasan terbentuknya BUMK ini mendapat dukungan yang sangat antusias dari masyarakat, sangat membantu terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Terbentuknya BUMK ini sudah melalui musyawarah bersama. Hadirnya BUMK merupakan suatu bentuk terobosan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Kampung Lae Pinang selama ini.

Sejak adanya BUMK hasil panen membaik, untuk mendapatkan pupuk jadi mudah, sawit juga lebih terurus dan buahnya memuaskan. Sebelum adanya BUMK terkadang sering tidak kebagian pupuk, sudah waktunya memupuk tapi pupuk tidak ada, harus nunggu dua hingga tiga minggu, dan itu jelas sangat mempengaruhi hasil panen.²³

Marwan warga kampung Lae Pinang menjelaskan bahwa belum semua masyarakat dapat menikmati pelayanan yang diberikan oleh BUMK Maju Bersama, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BUMK, ini menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi BUMK. Sosialisasi harus terus ditingkatkan agar semua masyarakat dapat mengakses pelayanan yang diberikan BUMK, untuk menghindari terjadinya ketimpangan kesejahteraan. Terlepas dari semua itu peran

²² Wawancara dengan Karmadi Selaku Warga di Kampung Lae Pinang, 24 Januari 2020.

²³ Wawancara dengan Mahbub Husaini Selaku Warga di Kampung Lae Pinang, 24 Januari 2020.

yang dijalankan BUMK selama ini sudah berjalan baik, ada beberapa kendala yang harus terus diperbaiki.²⁴

Pelayanan yang diberikan BUMK Maju Bersama sangat memuaskan, sudah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi pertanian. Selain itu harga sewa teratak yang ditawarkan sangat terjangkau, begitu juga harga pupuk tidak memberatkan masyarakat, walaupun belum seratus persen membantu setidaknya sudah membantu setengahnya. Sebagai bentuk kontribusi yang diberikan masyarakat kepada BUMK Maju Bersama yaitu dengan membeli produk yang dijual oleh BUMK, bisa juga membantu mempromosikan BUMK kepada masyarakat lainnya, dan memberikan ide serta pemikirannya pada saat musyawarah untuk BUMK yang lebih baik lagi ke depannya, ujar Endang Nurdiansyah warga kampung Lae Pinang.²⁵

Respons Pemerintah

Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kampung Lae Pinang merespons baik dan sangat mendukung terhadap ide gagasan pembentukan serta turut mengikuti kegiatan sosialisasi perencanaan pembentukan BUMK Maju Bersama.

Camat kecamatan Singkohor yang disampaikan oleh Sumadi selaku Sekretaris Camat, beliau menjelaskan bahwa turut hadir mengikuti kegiatan sosialisasi perencanaan pembentukan BUMK, kehadirannya tersebut dinilai merupakan suatu bentuk dukungan serius, ide dan gagasan pembentukan BUMK sangat bagus, sesuai dengan kondisinya di mana masyarakat Kampung Lae Pinang berkebun sawit pasti membutuhkan pupuk dan pestisida, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau, sangat membantu menggerakkan pendapatan petani di sektor itu sendiri.

BUMK ini milik Kampung khususnya keseluruhan hak milik Masyarakat Kampung Lae Pinang, seharusnya sasarannya lebih ditekankan untuk

²⁴ Wawancara dengan Marwan Selaku Warga di Kampung Lae Pinang, 24 Januari 2020.

²⁵ Wawancara dengan Endang Nurdiansyah Selaku Warga di Kampung Lae Pinang, 25 Januari 2020.

kriteria masyarakat menengah ke bawah, yaitu masyarakat yang baru merintis dan tidak memiliki kebun yang terlalu lebar, sedangkan masyarakat menengah ke atas yang memiliki kebun lebar dan penghasilan mapan, membeli pupuknya ke toke sawit. Hal ini Bukan untuk membatasi hak setiap masyarakat. Apabila ini dilakukan jelas akan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Lae Pinang. Tetapi untuk menjalankan ide ini harus ada musyawarah yang melibatkan semua pihak guna mencari titik temu serta kesepakatan bersama.

Sumadi tidak lupa untuk menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar sama-sama berperan aktif memajukan BUMK yang ada di Kampung Lae Pinang. Begitu juga dengan pengurus harus lebih aktif lagi menjalankan BUMK Maju Bersama, tidak semata-mata hanya mementingkan kepentingan pribadinya, agar masyarakat nantinya lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan pertanian dan tidak merasa kecewa atas kinerja serta pelayanan yang diberikan BUMK Maju Bersama.²⁶

Aliswan Sinaga selaku Penanggung Jawab Kepala Kampung Lae Pinang, beliau menuturkan bahwa dalam pembentukan BUMK Maju Bersama Kepala Kampung mengikuti kegiatan sosialisasi dan mengundang semua elemen guna membahas ide dan gagasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh BUMK selalu ada pengawalan dari kepala kampung, sehingga apa yang dijalankan BUMK sarannya bisa tepat ke masyarakat. Ide dan gagasan dalam pembentukan BUMK sangat bagus dan harus selalu didukung, di dalam gagasan itu dapat menunjang di segala bidang, baik itu pertanian dan perekonomian masyarakat. Sehingga ide dan gagasan ini sangat baik untuk masa depan Kampung Lae Pinang.

Kepala Kampung Lae Pinang memberikan kontribusinya dengan memberikan dana kepada BUMK Maju Bersama untuk mengembangkan usaha supaya bisa berjalan sepenuhnya. Memberikan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan BUMK Maju Bersama dalam menjalankan dan

²⁶ Wawancara dengan Sumadi Selaku Sekretaris Camat Kecamatan Singkohor, 20 Januari 2020.

mengembangkan usahanya, serta memberikan masukan berupa ide-ide baru.²⁷

Analisa

BUMK Maju Bersama hadir untuk menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat perihal kesenjangan distribusi yang dilakukan oleh pengusaha sawit. Sebelum adanya BUMK Maju Bersama, para petani di Kampung Lae Pinang bergantung pada pengusaha sawit dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya yang dinilai merugikan para petani. Ide dasar pembentukannya untuk menekan dominasi pengusaha sawit yang selama ini mengontrol dan mempermainkan harga jual kebutuhan pertanian, serta untuk melindungi perekonomian masyarakat Kampung Lae Pinang terhadap persaingan dengan pengusaha sawit yang memiliki modal besar. BUMK Maju Bersama menggunakan modal dari kucuran dana desa, selanjutnya dana tersebut dikelola sesuai dengan potensi asli kampung. Potensi kampung yang dimiliki kemudian dikembangkan dengan cara pemenuhan kebutuhan pertanian melalui perdagangan pupuk dan pestisida. Masyarakat lebih mudah mengakses berhak mendapatkan kebutuhan pertanian yang disediakan oleh BUMK Maju Bersama, harga yang ditawarkan juga lebih murah, tentu hadirnya BUMK Maju Bersama dinilai membawa perubahan positif bagi masyarakat Kampung Lae Pinang.

Perlawanan masyarakat yang dilakukan lebih dititik beratkan melalui BUMK Maju Bersama, namun sampai saat ini peran yang dijalankan belum berjalan sepenuhnya baik itu dari segi pengelolaannya dan programnya. Masih banyak terdapat kekurangan serta hambatan yang harus diperbaiki dan dibenahi. Belum semua masyarakat merasakan pemerataan kesejahteraan yang diberikan BUMK Maju Bersama, disebabkan oleh kurangnya sosialisasi antara pengurus BUMK Maju Bersama dengan masyarakat.

²⁷ Wawancara dengan Aliswan Sinaga Selaku Penanggung Jawab Kepala Kampung Lae Pinang, 20 Januari 2020.

Komunikasi dan sosialisasi merupakan dua hal penting yang harus dilakukan oleh BUMK Maju Bersama, jika keduanya tidak diterapkan maka akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada kemampuan pengurus dalam mengelola BUMK Maju Bersama, kemudian akan menimbulkan tuntutan harus adanya transparansi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menyelamatkan dana anggaran BUMK Maju Bersama dari praktik kepengurusan yang tidak sehat.

Kinerja BUMDes atau BUMK yang baik dapat diukur dari beberapa parameter sebagai berikut, di antaranya yaitu kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, keuntungan usaha, dan keberlangsungannya. Jika BUMK Maju Bersama diukur dengan parameter yang sama, maka pelayanan yang diberikan sudah baik sehingga memicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan membeli kebutuhan pertanian di BUMK. Pendapatan dan keuntungan usaha belum stabil masih mengalami pasang surut, akan tetapi dari pendapatan dan keuntungan tersebut mampu menjaga keberlangsungan BUMK Maju Bersama itu sendiri. Dari hasil analisis yang diukur dengan menggunakan parameter tersebut maka BUMK Maju Bersama masuk dalam kategori berkembang. Pengkategorian itu berdasarkan pada perkembangan jumlah aset dan usaha yang dijalankan. Penambahan aset dapat dilihat dari pembangunan gedung permanen milik BUMK Maju Bersama, dan penambahan usaha berupa jual beli kelapa sawit yang rencananya akan mulai dijalankan pada tahun 2021.²⁸

Kinerja suatu BUMDes atau BUMK juga harus ditinjau dari beberapa aspek, meliputi aspek pelayanan, aspek akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat mewadahi berbagai program pemerintah, kemudian aspek peningkatan taraf hidup terhadap kemandirian dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes atau BUMK, dan aspek ketaatan terhadap undang-undang. BUMK Maju Bersama sudah memenuhi berbagai aspek tersebut, hal ini dapat dibuktikan dan ditinjau dari kinerja pada aspek pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, aspek akuntabilitas meningkatnya pendapatan asli desa dari hasil penjualan kebutuhan pertanian, aspek pemerataan taraf hidup dapat

²⁸ Ach. Qosjim, "Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang," *Journal Ekuilibrium* Volume II, no. 1 (2017): hlm.13.

ditempuh melalui terpenuhinya kebutuhan pertanian masyarakat meskipun belum merata secara keseluruhan, dan aspek ketaatan terhadap undang-undang yaitu kemampuan dalam mengelola potensi desa, potensi desa yang dikelola oleh BUMK Maju Bersama bergerak pada bidang usaha perdagangan, penyewaan, dan jasa.²⁹

Sumber daya finansial merupakan salah satu faktor keberhasilan BUMK, dibutuhkan modal yang sangat besar dalam pelaksanaan program BUMK. Desa memberikan modal yang berasal dari APBDes yang kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan BUMK. Pada kenyataannya sumber daya finansial yang dialokasikan untuk BUMK Maju Bersama belum berjalan seperti yang diharapkan, sehingga terjadi kekosongan barang kebutuhan pertanian yang dibutuhkan masyarakat. Pengurus BUMK Maju Bersama harus menjawab permasalahan mengenai kekosongan barang kebutuhan pertanian secara transparan tanpa ada yang ditutupi agar tidak ada kecurigaan serta tidak menimbulkan stigma negatif baik itu di jajaran pengurus BUMK Maju Bersama maupun pemerintahan kampung.³⁰

Anggaran dana desa dan dana BUMK yang diberikan oleh pemerintah melalui kepala kampung merupakan dana yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya dana BUMK dikelola secara mandiri oleh masyarakat, dan pemerintah kampung sebagai pengawas dalam penggunaan dana tersebut. Penggunaan dana desa dan dana BUMK harus dikawal ketat oleh masyarakat, karena sejatinya dana tersebut diberikan oleh pemerintah digunakan dan dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu atau kepentingan individu. Tujuannya agar tidak ada oknum yang bermain dengan dana tersebut mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Jika dilihat secara umum tentang kepengurusan yang

²⁹ MahendraAdi Nugraha, "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi (Studi Di Kabupaten Tulungagung)" (Magister, Universitas Brawijaya, 2014), hlm.1., <http://repository.ub.ac.id/156091/>.

³⁰ Ihsan dan Setiyono, "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep," hlm.7.

koruptor, indikasinya pengurus suatu badan usaha atau lembaga tidak pernah terbuka dalam pengelolaannya.³¹

BUMK Maju Bersama harus lebih menekankan program *Sosial Enterprise* sebagai bentuk pengembangan usaha. Program ini bertujuan menggabungkan faktor sosial sebagai tujuan utama dan tidak hanya mengedepankan keuntungan semata. Ada beberapa daerah yang sudah berhasil menerapkan program ini salah satunya BUMDes Nglanggeran dengan usaha unggulannya yaitu sektor pariwisata. Setelah sektor pariwisata berkembang maka lahirlah usaha yang bergerak pada sektor lain, sehingga mampu menyerap banyak sumber daya manusia, dan berhasil mengurangi angka pengangguran. Pendapatan yang diperoleh sebagian dialokasikan untuk program santunan dan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, kaum duafa, dan masyarakat yang tertimpa musibah.³²

BUMK Maju Bersama bisa mengikuti langkah BUMDes Nglanggeran dalam keberhasilan menjalankan program *Sosial Enterprise*. Mengikuti dalam artian bukan pada sektor atau bidang usahanya tetapi lebih pada program *Sosial Enterprisenya*, karena setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat di Kampung Lae Pinang tidak ada sektor pariwisata yang harus dikembangkan berbeda dengan di Desa Nglanggeran. Maka BUMK Maju Bersama harus memperkuat usaha pada bidang perdagangan kebutuhan pertanian sebagai sektor unggulan. Setelah sektor ini berhasil dan berkembang barulah melebarkan sayapnya pada sektor yang lain, yang nantinya diharapkan menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Kampung Lae Pinang. Pendapatan yang diperoleh sebagian akan dialokasikan untuk kegiatan sosial. Sehingga Kampung Lae Pinang

³¹ Rachmat Kriyantono dkk., "Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pelaksanaan Program BUMDes Di Desa Gendro – Kabupaten Pasuruan," *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 4, no. 2 (22 Desember 2019): hlm.24, <https://doi.org/10.26905/abdimas.v4i2.3229>.

³² Yofais Ahgio Khosyi, Alfian Nurrohman, dan Rizqi Anfanni Fahmi, "Analisis Pelaksanaan Program *Sosial Enterprise* Di BUMDes Nglanggeran," Working Paper (Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 8 Agustus 2018), hlm.9, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9611>.

mampu menjadi kampung yang mandiri, kuat secara ekonomi dan kuat juga hubungan sosialnya.

Kesimpulan

BUMK Maju Bersama telah menerapkan manajemen secara terstruktur, proses pengelolaannya telah melewati beberapa tahap seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Sehingga memudahkan dalam memberikan akses pelayanan kepada masyarakat. Program yang dijalankan memberikan manfaat dan membawa perubahan positif di dalam masyarakat, serta mampu mematahkan dominasi pengusaha sawit yang selama ini memegang kendali dalam hal pemenuhan kebutuhan pertanian. Kehadiran BUMK Maju Bersama mendapat respons baik dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah, sehingga terciptanya hubungan simbiosis mutualisme antara BUMK Maju Bersama dengan masyarakat Kampung Lae Pinang. Terlepas dari semua itu masih banyak kendala yang dihadapi dan harus terus diperbaiki, lambatnya pengalokasian dana masih menjadi kendala terbesar dan menjadi penghambat BUMK Maju Bersama untuk berkembang.



Daftar Pustaka

- Ach. Qosjim. "Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang." *Journal Ekulilibrium* Volume II, no. 1 (2017).
- Azis Prasetyo, Ratna. "Peranan BUMDes Dalam Membangun Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika* 11, no. 1 (2016).
- Baihaqi, Muhammad, Syardiansah Syardiansah, dan Zulkarnen Mora. "Penguatan Kapasitas BUMG Bersama Minapolitan Meurasa Saban Kabupaten Aceh Timur Melalui Eduteknopreneurship." *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (31 Oktober 2019). <https://doi.org/10.31604/jpm.v2i2.85-93>.
- Darwita, I. Kadek, dan Dewa Nyoman Redana. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng." *Locus* 9, no. 1 (1 Februari 2018). <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view/79>.
- Hasiholan, Leonardo Budi. "Teori Organisasi Suatu Tinjauan Perspektif Sejarah." *Dinamika Sains* 10, no. 24 (2012). <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/dinsain/article/view/86>.
- Ihsan, Ahmad Nur, dan Budi Setiyono. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." *Journal of Politic and Government Studies* 7, no. 04 (25 September 2018).
- Isnaul Haasnah, Binti. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Srikandi Desa Tunggangri Kalidawir Tulungagung." IAIN Tulungagung, 2019.

- Kheriah, Yulianisah, Rusydi, dan Yenni Irawan. "Pembuatan Sabun Cuci Piring Cair Sebagai Salah Satu Unit Usaha BUMG pada Gampong Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe." *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe* 3, no. 1 (2019).
- Khosyi, Yofais Ahgio, Alfian Nurrohman, dan Rizqi Anfanni Fahmi. "Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise Di BUMDes Nglanggeran." Working Paper. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 8 Agustus 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9611>.
- Kirowati, Dewi, dan Lutfiyah dwi Setia. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)." *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)* 3, no. 1 (28 Mei 2018). <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213>.
- Kriyantono, Rachmat, Yun Fitrahayati Laturrahmi, Sinta Swastikawara, Azizun Kurnia Illahi, dan Dessanti Putri Sekti Ari. "Pemberdayaan Perangkat Desa Dalam Penyampaian Informasi Publik Untuk Mencegah Korupsi Dalam Pelaksanaan Program BUMDes Di Desa Gendro – Kabupaten Pasuruan." *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang* 4, no. 2 (22 Desember 2019). <https://doi.org/10.26905/abdimas.v4i2.3229>.
- Malik, Ikhsan Maulana, Dewi Rahmi, dan Ria Haryatiningsih. "Dampak Pembiayaan BMT Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di Kota Bandung," no. 2 (2015). <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/2898>.
- Nugraha, MahendraAdi. "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dan Implikasinya Bagi Kemandirian Ekonomi (Studi Di Kabupaten Tulungagung)." Magister, Universitas Brawijaya, 2014. <http://repository.ub.ac.id/156091/>.
- Qanun No 83 Tahun 2018 "Peraturan Kampung Keputusan Keuchik Tentang Pembentukan BUMK Maju Bersama".

- Ridlwan, Zulkarnain. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (6 November 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.
- Rismawati. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perwitasari dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal." Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Walisongo, 2018.
- Rosa Ratna Sri Anggraeni, Maria. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul Yogyakarta." *Modus* 28, no. 2 (2016).
- Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 14, no. 1 (2013).
- Sitepu, Yovita Sabarina. "Paradigma Dalam Teori Organisasi Dan Implikasinya Pada Komunikasi Organisasi." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 2 (3 Oktober 2011).
- Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Gampong.
- Undang Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1) "Pemerintahan Daerah Sebagai Kerangka Dasar Otonomi Daerah".
- Wawancara dengan Aliswan Sinaga Selaku Penanggung Jawab Kepala Kampung Lae Pinang, 20 Januari 2020.
- Wawancara dengan Endang Nurdiansyah Selaku Warga di Kampung Lae Pinang, 25 Januari 2020.
- Wawancara dengan Karmadi Selaku Warga di Kampung Lae Pinang, 24 Januari 2020.
- Widyastuti, Yuli. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pujokerto Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/1445/>.